

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Saprudin, S. (2025). Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama-Sama Dalam Pembuatan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3649-3661.
- Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 201.
- Adjie, H. (2017). Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2), 201-218.
- Adolf, J., Handoko, W., & Azhar, M. (2020). Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Notarius*, 13(1), 182
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432-451.
- Arminsyah, A. (2025). Maqasid al-Shariah in contemporary legal systems: An analysis of digital rights and privacy protection. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 12(2), 289-308.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d). *Autentik*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.web.id/autentik>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *Akta*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.web.id/akta>

- Balqiys, S. K., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., Septiana, D., & Ariani, N. D. (2026). Implementasi Tanda Tangan Elektronik dan Legalitasnya dalam Pelayanan Akta Notaris. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 593-602.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Panduan AHU Online," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, <https://panduan.ahu.go.id>.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Panduan Pemesanan Nama Yayasan dan Perkumpulan," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, <https://panduan.ahu.go.id>.
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pemesanan Nama Badan Hukum," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=perseroan_terbatas
- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "Pendirian Perseroan Terbatas," Panduan AHU Online, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 45.
- Fatmawati, N. A. (2020). Kekuatan Pembuktian Digital Signature Pada Akta yang Dibuat oleh Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 4(2), 146-157.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 32.

Hariyadi Dwi P, Notaris dan PPAT, *Wawancara Pribadi*, Kantor Notaris dan PPAT Hariyadi Dwi P, Kabupaten Klaten, Jum'at 7 Agustus 2026, pukul 10.00 WIB.

Herliyan, E., Sutrisno, E., & Astawa, I. G. P. (2025). DIGITALIZATION OF NOTARY SERVICES TOWARDS LEGAL CERTAINTY FOR THE PARTIES IN MAKING DEEDS. *Veredas do Direito*, 22(6), e223573-e223573.

Juliani, A. D. (2024). Penyusunan Akta Perjanjian Elektronik dalam Hukum Keperdataan: Peran Notaris dan Tanggung Jawab Hukum. *Officium Notarium*, 4(2), 177-201.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). *Notaris*. Diakses 23 April 2026, dari <https://kbbi.web.id/notaris>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2020). *Prosedur persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui sistem AHU Online*. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). *Perseroan Terbatas (Sistem Administrasi Badan Hukum – SABH)*. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>

Kementerian Hukum dan HAM RI, “Prosedur Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem AHU Online,” Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, 2020, <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1870

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1868

Lapian, R. (2024). Pengaturan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Menurut UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Privatum*, 13(1).

Lavellia Ardita Dewi, Notaris dan PPAT, *Wawancara Pribadi*, Kantor Notaris dan PPAT Lavellia Ardita Dewi, Kabupaten Klaten, Sabtu 9 Mei 2026, pukul 14.00 WIB.

Limantara, N., Barkatullah, A. H., & Zulaeha, M. (2023). Keabsahan Penghadap Yang Menghadap Secara Daring Dalam Cyber-Notary. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 580-592.

Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas tanda tangan elektronik: Possibilitas dan tantangan *notary digitalization* di Indonesia. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 45–58.

Mulyoto. (2019). *Hukum Kenotariatan di Indonesia: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Notaris*. Yogyakarta: Deepublish.

Nadya Novina Kusuma, Notaris dan PPAT, *Wawancara Pribadi*, Kantor Notaris dan PPAT Nadya Noviana Kusuma, Kabupaten Klaten, Selasa 5 Mei 2026, pukul 15.00 WIB.

Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Pelapu, I. J. (2024). KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA NOTARIS. *LEX PRIVATUM*, 14(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Pasal 9–10; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, Pasal 2. Percepatan waktu layanan dikutip dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, "*FAQ Fidusia Online*," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diakses pada 6 Juli 2026, <https://portal.ahu.go.id>.

Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta dan pembuatan akta otentik dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.

Pratama, I. E. (2025). Opportunities for the digital implementation of legalization and certification by notaries public. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 7(1). <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.274>

Rusdy, R. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance. *Lex Lata*.

- Salsabila & Patras, "Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 6 (2022): 1955.
- Salsabila, P. N. T., & Patras, G. (2022). Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1947-1958.
- Sona, M. N. M. (2022). Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary. *Officium Notarium*, 2(3), 497-505.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 109.
- Surmaningsih, F. E. (2001). Peraturan Jabatan Notaris, Diktat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan. Semarang
- Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis keabsahan dan keamanan cyber notary berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214–224.
- Suryawiramurti, P. G. (2026). Analisis Keabsahan dan Keamanan Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 214-224.
- Tobing, G. H. . L. (1999). Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement). Jakarta: Penerbit Erlangga

Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. Aliansi: *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 01–13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

Zainal Abidin dan Saprudin Saprudin, “Penandatanganan Para Pihak dalam Pembuatan Akta Notaris,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 4, 2025, hlm. 3654.